



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

CATATAN RAPAT

Tahun Sidang : 2025
Masa : III
Persidangan
Rapat Ke :
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin/25 Agustus 2025
Waktu : 08.00 WIB – selesai
Tempat : Graha Paripurna DPRD Kota Blitar
Jalan A. Yani No. 19 Kota Blitar
Pimpinan : dr. Syahrul Alim
Rapat
Acara :

- Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Blitar Tahun 2025
- Penetapan Persetujuan Bersama Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar Tentang Perubahan APBD (P-APBD) Kota Blitar Tahun Anggaran 2025

Sekretaris : Dra. Eka Atikah (Sekretaris DPRD Kota Blitar)
Hadir : A. Anggota DPRD Kota Blitar Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029

- 1. Fraksi PDI Perjuangan

Hadir 10 orang dari 9 orang anggota

- 1. dr.Syahrul Alim
- 2. Yudi Meira, S.T.
- 3. Johan Marihot
- 4. Siswanto, S.T
- 5. Aris Dedi Arman
- 6. Dedik Hendarwanto, S.T.
- 7. Sudarwati
- 8. Bayu Kurniawan
- 9. Tan Ngi Hing, S. Sos
- 10. Yohan Tri Waluyo

Tidak Hadir :

-

2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Hadir 5 orang dari 5 orang anggota

- 1. Ely Idayah Vitnawati
- 2. Drs. Abdus Sjakur
- 3. Adi Santoso, S.P
- 4. Totok Sugiarto
- 5. Judarso, SH

Tidak Hadir :

-

3. Fraksi Partai Golongan Karya

Hadir 2 orang dari 3 orang anggota

1. Mohamad Hardita Magdi, S.H.
2. Purwanto, S. Sos

Tidak Hadir :

1. Yasa Kurniawanto, Amd. Kep - Ijin

4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Hadir 3 orang dari 3 orang anggota

1. Agus Zunaidi, SE
2. Guntur Pamungkas, S.M
3. H.Muh. Nuhan Eko Wahyudi, S.H.

Tidak Hadir :

-

5. Fraksi Partai Amanat Nasional

Hadir 3 orang dari 4 orang anggota

1. Adi Rianto
2. Eva Novianti
2. Rido Handoko, SPd

Tidak Hadir

1. Muhamad Raihan Tsany Azzura

C. Pemerintah

1. Walikota Blitar
2. Wakil Walikota Blitar
3. Sekretaris Daerah Kota Blitar
4. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesra
5. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
6. Staf Ahli
7. Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
8. Camat se-Kota Blitar

D. Undangan Yang Lain

1. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar
2. Kapolres Blitar Kota
3. Komandan Kodim 0808 Blitar
4. Komandan Batalyon Infanteri 511 Blitar
5. Ketua Pengadilan Negeri Blitar
6. Tenaga Ahli Fraksi

PENDAHULUAN

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

Hadirin dimohon berdiri

*Walikota Blitar, Pimpinan DPRD Kota Blitar, Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan Anggota FORKOPIMDA Kota Blitar, memasuki Graha Paripurna
Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya*

---(Menyanyikan Lagu Indonesia Raya)---

Hadirin disilakan duduk kembali

Assalamualaikum warahmatullahi wa barakaatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

*Bapak ibu undangan yang kami hormati, beriring ucapan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima Agustus tahun dua ribu dua puluh lima kita dapat hadir bersama mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar dengan agenda: **“Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Blitar Tahun 2025 dan Penetapan Persetujuan Bersama Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar Tentang Perubahan APBD (P-APBD) Kota Blitar Tahun Anggaran 2025”***

Hadirin yang berbahagia,

Rapat paripurna pada pagi hari dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Blitar yang terhormat bapak dokter syahrul alim, kami silahkan.

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Semoga Rahmat dari Allah subhanahu wa taala senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin

Yth. Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kota Blitar ;

Yth. Sdr. Walikota Blitar

Yang saya Hormati :

- Kepala Kejaksaan Negeri Blitar atau yang mewakili*
- Kapolres Blitar Kota atau yang mewakili*
- Komandan Kodim 0808 Blitar atau yang mewakili*
- Komandan Batalyon Infanteri 511 Blitar atau yang mewakili*
- Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau yang mewakili*

Yang saya hormati

- Ketua dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Kota Blitar,*
- Sekretaris DPRD, Para Asisten, Staf Ahli serta seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang hadir di Gedung Graha Paripurna ini.*
- Insan pers serta hadirin tamu undangan yang berbahagia*

Segala puji hanya milik Alloh Subhanahu Wata’ala, yang menganugerahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam forum Rapat Paripurna hari ini dalam keadaan sehat wal’afiat.

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada pimpinan umat dan teladan kita, Nabi Muhammad Sholallohu ‘alaihiwassalam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman serta memohon syafaat-Nya di hari kiamat kelak. Amin.

Saya menyampaikan terima kasih kepada Saudara Walikota Blitar, Rekan-rekan FORKOPIMDA serta hadirin sekalian yang telah berkenan menghadiri undangan Rapat Paripurna pada hari ini.

Sebelum memulai Rapat Paripurna saya atas nama Pribadi, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Blitar mengucapkan selamat kepada UPT Rumah Potong Hewan Ruminansia Kota Blitar yang telah meraih penghargaan sebagai unit usaha berkomitmen dalam penerapan halal serta penjaminan higiene dan sanitasi pada acara Festival Ekonomi Syariah Jawa Timur Tahun 2025 dari Gubernur Jawa Timur. Semoga dengan penghargaan ini mewujudkan komitmen Pemerintah Kota Blitar secara konsisten dan

berkelanjutan dalam menjaga kualitas daging yang sehat, aman sesuai dengan standart keamanan dan syariat islam bagi masyarakat.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Sebagaimana daftar hadir yang dilaporkan, dari 25 orang anggota dewan telah hadir 23 Orang. Dengan demikian berdasarkan Peraturan DPRD Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar, kuorum telah terpenuhi dan rapat dapat dilaksanakan.

Dengan mengucapkan *bismillahirrohmanirrohim* Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar pada hari ini Senin tanggal 22 September 2025 dengan agenda acara :

1. **PENETAPAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KOTA BLITAR TAHUN 2025;**
2. **PENETAPAN PERSETUJUAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN APBD (P-APBD) KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2025;**

Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

-----Ketukan Palu 1X-----

Sesuai dengan agenda pertama Rapat Paripurna hari ini segera kita simak pembacaan Berita Acara hasil Rapat Perubahan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2025 antara DPRD dengan Pemerintah Kota Blitar.

Kepada Ketua BAPEMPERDA, disilahkan.

BAYU KURNIAWAN - Anggota Bapemperda DPRD Kota Blitar

Berita Acara No. 24/BA/Bapemperda/IX/2025. Kesepakatan Bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Blitar Dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar Tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2025

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Ruang Rapat DPRD Kota Blitar, dihadiri oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Blitar dan Pemerintah Kota Blitar yang diwakili oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar telah dilaksanakan rapat pembahasan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Blitar Tahun 2025. Sesuai hasil rapat tersebut telah disepakati Perubahan Propemperda Kota Blitar Tahun 2025 sebagai berikut :

A. Raperda Kumulatif Terbuka, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030; dan

B. Raperda di luar Kumulatif Terbuka yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017 – 2037;

5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025-2045; dan
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Blitar dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar sebagai persetujuan guna penetapan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar. Blitar 19 September 2025 an. Sekretaris Daerah Kota Blitar Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Ub Kepala Bagian Hukum Ika Hadi Wijaya SH., MH Ketua Badan Pembentukan Daerah DPRD Kota Blitar Ketua Johan Marihot, ditanda tangani

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih.

Demikian tadi telah kita simak pembacaan Berita Acara hasil Rapat Perubahan Pembentukan Perda Kota Blitar Tahun 2025, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Rancangan Keputusan DPRD Kota Blitar. Guna memenuhi hak segenap anggota dewan, maka saya tawarkan pada forum Rapat Paripurna hari ini :

Apakah Rancangan Keputusan DPRD tentang perubahan PROPEMPERDA Kota Blitar Tahun 2025 dapat disetujui ?

-----(*Persetujuan secara aklamasi dari Anggota DPRD Kota Blitar*)-----

-----Ketukan Palu 1X-----

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terimakasih

Agenda selanjutnya adalah rangkaian penetapan persetujuan bersama atas Raperda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025, yang akan diawali dengan pembacaan laporan hasil pembahasan dari Badan Anggaran Kota Blitar.

Kepada juru bicara Badan Anggaran, disilahkan.

JOHAN MARIHOT – Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Blitar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahi Walkhamdulillah Wasyukurillah Lahaula Walakuuwata Illai Billahil'aliyyil Adzim

Yang Terhormat : Pimpinan Rapat, Ketua dan Wakil Ketua serta Para Anggota DPRD Kota Blitar

Yang Kami Hormati : Walikota Blitar dan Wakil Walikota Blitar

Yang Kami Hormati

- Pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Beserta Komandan Yonif 511 Dan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, atau yang mewakili
- Sekretaris Daerah Kota Blitar
- Sekretaris DPRD, Para Asisten, Staf Ahli, Para Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, dan Camat Se- Kota Blitar,
- Serta Hadirin Para Undangan Yang Berbahagia

Segala Puji dan Syukur Bagi Allah SWT, Yang Telah Melimpahkan Rahmat dan Nikmat Kepada Kita, sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna :

- **Penetapan Perubahan Propemperda Kota Blitar Tahun 2025, dan**
- **Penetapan Persetujuan Bersama Atas Raperda Kota Blitar Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025**

Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Tauladan Kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, dan kita berharap semoga termasuk di dalamnya. Amin.

Bapak/Ibu Hadirin yang kami hormati, berikut disampaikan **laporan hasil pembahasan Raperda Kota Blitar Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025**

1.1. Latar Belakang

DAN SETERUSNYA

1.2. Dasar Hukum

Landasan penyusunan Laporan Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

DAN SETERUSNYA SAMPAI DENGAN NOMOR

17. Hasil Rapat Fraksi – fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD, serta hasil Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD Kota Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan

DAN SETERUSNYA

1.4. Waktu dan Tempat Pembahasan

Pembahasan dilakukan melalui rapat-rapat, baik melalui rapat intern maupun rapat kerja Badan Anggaran, dan dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Blitar pada tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan 19 September 2025 (sebagaimana Jadwal Terlampir)

DAN SETERUSNYA

1.5. Peserta Rapat

Pembahasan Atas Raperda Kota Blitar Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Blitar dengan susunan sebagai berikut:

1.6. Sistematika Laporan

DAN SETERUSNYA

ANGKA ROMAWI DUA MATERI PEMBAHASAN

Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana disampaikan melalui Surat dari Walikota Blitar Nomor 900.1.1.4/219/410.202.4/2025 tertanggal 20 Agustus 2025 perihal Penyampaian Rancangan Perda P-APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perwali Penjabaran P-APBD Tahun Anggaran 2025. Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud berdasarkan Perubahan KUA 2025 dan PPAS 2025 yang telah disepakati Walikota dan DPRD, dalam Nota Kesepakatan Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Blitar sebagai berikut :

- Nota Kesepakatan Nomor 38 Tahun 2025 dan Nomor 19/BA.DPRD/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025 Tentang Perubahan KUA TA 2025
- Nota Kesepakatan Nomor 39 Tahun 2025 dan Nomor 20/BA.DPRD/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025 Tentang Perubahan PPAS TA 2025

ANGKA ROMAWI TIGA DINAMIKA PEMBAHASAN

1. Pembahasan Rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS DAN SETERUSNYA SAMPAI DENGAN NOMOR 6 (ENAM)
6. Bahwa Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan Raperda yang berasal dari Walikota yang perlu mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota, sebagaimana ketentuan pembahasan dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II

ANGKA ROMAWI EMPAT HASIL PEMBAHASAN

Hasil Pembahasan berdasarkan Jenis Rapat diuraikan sebagai berikut :

1. pembahasan Rapat Komisi dan Rapat Kerja Komisi bersama Mitra Kerja Komisi menghasilkan masukan / usulan Komisi dari hasil kinerja pengawasan dan pokok-pokok pikiran DPRD selanjutnya masuk inventarisasi permasalahan Komisi DAN SETERUSNYA SAMPAI DENGAN NOMOR 5 (LIMA)
5. Rumusan hasil pembahasan dan simpulan – simpulan dari keseluruhan hasil kegiatan rapat – rapat, yang pada pokoknya terkait dengan muatan materi yang terdapat dalam Raperda P- APBD Tahun Anggaran 2025 yang menjadi bahan penyamaan persepsi dan kesepahaman bersama antara Badan Anggaran sebagai representasi DPRD Kota Blitar dan TAPD sebagai perwakilan Pemerintah Kota Blitar (Walikota Blitar) dan keseluruhan hasil kegiatan diatas dimasukkan dalam rumusan laporan Badan Anggaran diantaranya memuat pokok-pokok pembahasan, catatan strategis dan rekomendasi yang memuat hasil koreksi dan review terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sekaligus merupakan koreksi dan perbaikan terhadap konsiderans menimbang, bagian mengingat, penerapan dasar hukum dan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh yaitu tentang muatan materi terkait dengan Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sampai dengan penentuan Plafons Anggaran yang menjadi Pagu Definitif setelah disahkannya Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan ketentuan perundang – undangan.

ANGKA ROMAWI LIMA CATATAN STRATEGIS

1. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 didasarkan Nota Kesepakatan Pemerintah Kota Blitar dengan DPRD Kota Blitar tanggal 15 Agustus 2025, di dalam dokumen Perubahan KUA 2025 tersebut menyajikan perubahan kebijakan belanja daerah yang akan diimplementasikan sesuai rumusan prognosis enam bulan berikutnya pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, namun rumusannya belum cukup spesifik mencerminkan dukungan pendanaan untuk mencapai sasaran daerah yang hendak dicapai pada tahun tahapan awal implementasi RPJMD 2025-2029 sekaligus tahun pertama masa jabatan Walikota dan wakilnya yang baru untuk mewujudkan visi dan misinya yaitu: Visi “Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Masa Depan” akan diwujudkan dengan 5 (lima) misi yaitu :
 - 1) Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis;
 - 2) Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera;
 - 3) Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance;
 - 4) Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter;
 - 5) Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri.

DAN SETERUSNYA SAMPAI DENGAN NOMOR 78 (TUJUH PULUH DELAPAN)

78. Tindak lanjut tentang penyelesaian Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp 38.918.549.107,57 (Tiga puluh delapan milyar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah lima puluh tujuh sen) merupakan Kewajiban Jangka Pendek, apakah sudah masuk dalam kontruksi P-APBD Tahun Anggaran 2025 ini? Terhadap Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana tercantum dalam LKPD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 (audited) tersebut meliputi:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga telah dibayarkan pada 22 Januari 2025
- b. Pendapatan Diterima Dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima pembayarannya oleh Pemerintah namun belum ada penyerahan barang/jasa pada saat akhir tahun anggaran utamanya atas hasil sewa BMD.
- c. Utang Belanja yang terdiri Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Tidak Terduga telah diperhitungkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 maupun pada Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025.
- d. Sementara untuk utang belanja pada BLUD menjadi fokus Pemerintah Kota Blitar untuk segera dilakukan penyelesaian dengan memperhatikan ketentuan tentang pengelolaan BLUD.

ANGKA ROMAWI ENAM REKOMENDASI

1. Keseluruhan muatan materi yang terdapat dalam Catatan Strategis DPRD Kota Blitar dalam dokumen Laporan ini dan keseluruhan rekomendasi dalam dokumen Perubahan KUA PPAS 2025 merupakan satu rangkaian dari rekomendasi DPRD Kota Blitar atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
2. Pemerintah Kota Blitar pada semester ke dua tahun 2025 agar segera melakukan upaya-upaya yang lebih serius untuk meningkatkan realisasi pendapatan melebihi target yang ditetapkan dalam P-APBD 2025 melalui:
3. Optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara:
 - 1) Memperkuat proses pemungutan yang lebih transparan dan akuntabel
 - 2) Peningkatan kapasitas pengelola penerimaan daerah
 - 3) Meningkatkan pengawasan untuk menekan kebocoran
 - 4) Meningkatkan efesiensi administrasi (penyederhanaan) dan menekan biaya pemungutan
 - 5) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik
 - 6) Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi.
 - 7) Peningkatan profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BLUD
4. Dalam menetapkan target PAD khususnya pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kota Blitar agar terlebih dahulu menghitung kembali potensi-potensi dengan didasarkan data-data yang valid dan akurat serta berdasarkan Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), sehingga pada realisasi akhir tahun anggaran antara potensi, target dan capaian realisasi selisihnya tidak terlalu jauh
5. Agar ada upaya yang lebih serius dalam pelaksanaan APBD sehingga serapan anggaran tahun 2025 maksimal dan silpa tahun 2025 dapat terus ditekan sampai batas wajar. Pemerintah Kota Blitar diharapkan mampu menjalankan kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja

daerah yang lebih berkualitas sehingga serapan anggaran tahun 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya dan silpa tahun berjalan tetap dapat ditekan pada batas normal 5% plus 1 dari realisasi dana tersedia, sebagaimana realisasi APBD tahun 2024.

6. Pemerintah Kota Blitar agar melakukan percepatan pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan / berjalan pada Semester I Per 30 Juli tahun 2025 sebesar Rp148.390.124.827,76 agar tidak menjadi dana menganggur (idle cash) . Badan Anggaran meminta kepada TAPD agar mencermati Posisi realisasi APBD menunjukkan kondisi surplus sebesar Rp94.916.865.062,23 pada akhir Semester I. Surplus ini diperoleh dari selisih antara pendapatan yang sudah diterima dan belanja yang telah dikeluarkan. Surplus ini kemudian ditopang oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp53.473.259.765,53 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp53.450.843.127,59 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp22.416.637,94.
7. Pemerintah Kota Blitar agar meningkatkan capaian kinerja pengadaan barang dan jasa Pemerintah menunjukan performa yang kurang memadai/ rendah, diantaranya : Pengadaan Barang pada perencanaan RUP terdapat 3.076 paket sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025 masih terserap / realisasi sejumlah 986 tersisa 2.090 atau 67%
8. Pekerjaan Konstruksi Berdasarkan perencanaan RUP terdapat 255 Sampai dengan tanggal 8 Agustus telah realisasi sejumlah 69 paket, tersisa 186 atau 72,94% sisanya
9. Jasa Lainnya Berdasarkan perencanaan pada RUP terdapat 1.429 Paket telah realisasi sejumlah 469 paket tersisa 960 paket atau 67%.
10. Pemerintah Kota Blitar diminta untuk lebih mengoptimalkan capaian kinerja kegiatan tahun 2025 baik Non Fisik atau semua pekerjaan fisik /konstruksi dengan mempertimbangkan kesediaan waktu kurang dari 4 (empat) bulan kalender, agar tidak ada kegiatan baik pekerjaan fisik / non fisik yang BATAL atau GAGAL lelang pada tahun 2025 ini dengan alasan ketidak cukupan waktu
11. Pemerintah Kota Blitar diminta untuk segera menyelesaikan Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang akan diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 Rp38.918.549.107,57 (Tiga puluh delapan milyar Sembilan ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah lima puluh tujuh sen) termasuk kewajiban RSUD Mardi Waluyo atas klaim pembayaran darah di PMI.
12. Pada alokasi belanja kegiatan pemberian Bimbingan Belajar Gratis untuk Siswa SMA yang akan melanjutkan pada Perguruan Tinggi agar dipertimbangkan kembali, mengingat waktu yang hanya tersisa kurang dari 4 (empat) bulan dan masih perlu dilakukan kajian terkait dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur belanja sebagai belanja hibah atau belanja jasa, skema kerja sama atau lainnya.
13. Pemerintah Kota Blitar agar segera lakukan reviu atau peninjauan kembali atas SE Nomor 19 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perwali No 6 Tahun 2022 tentang Program RT Keren sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan Ketiga Atas Perwali Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Perwali No 6 Tahun 2022 tentang Program RT Keren, dan Reviu Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, beserta belied turunan seperti Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan peraturan daerah. Swakelola Tipe I adalah jenis swakelola yang

bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam pelaksanaan pekerjaan, Swakelola tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan peran serta/pemberdayaan Ormas dan Kelompok Masyarakat.

14. Dengan memperhatikan kondisi BUMD yang saat ini telah ada yaitu Perumda Air Minum Tirta Patria dan Perumda BPR Kota Blitar serta BLUD RSUD Mardi Waluyo, yang sampai dengan saat ini belum banyak berkontribusi terhadap pendapatan daerah, maka Pemerintah Kota Blitar diharapkan dapat untuk melakukan penundaan untuk pembentukan BUMD baru dan mengatasi permasalahan yang ada pada ketiga Badan Usaha tersebut.

DAN SETERUSNYA SAMPAI DENGAN NOMOR 28 (DUA PULUH DELAPAN)

28. Pemerintah Daerah agar segera lakukan evaluasi terhadap dua Perumda Kota Blitar meliputi :
 1. Kelangsungan Usaha (Going Concern) Perumda Air Minum Tirta Patria. Laporan keuangan telah disusun dengan anggapan bahwa perusahaan akan melanjutkan usahanya secara berkelanjutan (Going Concern) sampai dengan Tahun Buku 2022 perusahaan mengalami kerugian yang berulang kali dari usahanya, jumlah kerugian akumulatif sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp. 34.205.758.948.03 (Tiga puluh empat milyar dua ratus lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah tiga sen) atau mencapai 71,99% dari jumlah modal yang telah ditempatkan sebesar Rp. 47.511.870.661,08. (Empat puluh tujuh milyar lima ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) Pada Tahun 2024 juga mengalami penurunan sebesar Rp3.316.521.357,53 (Tiga milyar tiga ratus enam belas juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh lima puluh tiga rupiah)
 2. Pada Perumda BPR Kota Blitar juga demikian, adanya pembebanan biaya adjudgement kerugian akibat fraud yang terjadi pada sekitar September 2018 hingga April 2019 sebesar Rp. 1.038.013.000,00 (Satu milyar tiga puluh delapan juta tiga belas ribu rupiah) sepenuhnya ditanggung oleh Perumda BPR Kota Blitar.
 3. Untuk meningkatkan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (dividen BUMD) Pemerintah Kota Blitar agar memperbaiki sistem manajemen organisasi, mengkonsentrasikan bisnis pada usaha yang berprospek tinggi, memperluas pasar, meningkatkan efesiensi usaha, meningkatkan kualitas SDM, serta memaksimalkan peluang eksternal seperti upaya kerja sama dengan perusahaan lain yang terkait

ANGKA ROMAWI TUJUH KESIMPULAN

1. Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini telah melalui proses reviu, koreksi, revisi dan perbaikan bentuk dan susunan serta perangkaan beserta lampiran - lampirannya telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta lampiran, hasil pembahasan TAPD dan Badan Anggaran, berdasarkan bentuk dan susunan serta perangkaannya telah memenuhi syarat formal dan material sebagai bahan penetapan persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD atas Raperda Perubahan APBD tahun 2025 yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi sebelum

ditetapkan sebagai Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Walikota Blitar

ANGKA ROMAWI DELAPAN PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran terhadap Raperda Kota Blitar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan harapan laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota Blitar atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan selanjutnya untuk Walikota wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama ini.

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih

Selanjutnya, kita ikuti penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi DPRD. Kesempatan pertama kepada Fraksi PDI-Perjuangan, disilahkan.

SISWANTO, ST – Anggota DPRD Kota Blitar dari Fraksi PDI Perjuangan

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh,

Selamat Malam dan Salam Sejahtera Bagi kita semuanya,

Sallom.....

Merdeka...!!!

Yth. Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kota Blitar

Yth. Sdr. Walikota Blitar dan Wakil Walikota Blitar

Yth. Pejabat Forum Kordinasi Pimpinan Daerah atau Yang Mewakili

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri dan Komandan Yonif 511 atau yang Mewakili

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas. Kepala Bagian Dan Camat Se-Kota Blitar. Serta Segenap Hadirin Tamu undangan serta Awak Media Baik cetak maupun Elektronik.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat beserta hadirin yang berbahagia

Allhamdulillah Wasyukurilah Segala Puji Bagi Allah Subhanahu Wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Nikmat kepada kita semua, Sehingga kita masih diberi Kesempatan dan Kesehatan untuk dapat mengikuti Rapat Paripurna dengan Penuh Kebahagiaan.

Sidang Paripurna yang kami hormati dan hadirin Yang Berbahagia

Dalam Kesempatan pada hari ini, izinkan kami mengucapkan Terimakasih kepada Pimpinan atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan Pendapat Fraksi PDI Perjuangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025.

Sebagaimana Kita Pahami bersama dalam rangka menghadapi Perubahan – perubahan atas asumsi – asumsi dasar yang mana telah menjadi kesepakatan bersama dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan perkembangan isu strategis dan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan kota Blitar, yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi mikro Ekonomi dan postur APBD Tahun Anggaran 2025. Maka dari itu untuk melakukan perubahan, pergeseran skala prioritas maupun pergeseran Anggaran.

Yang Berdasarkan Arah Kebijakan Pemerintah Kota Blitar Yang Tersaji Pada Buku Pedoman Arah Kebijakan Keuangan Perubahan KUA Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 Sebagai Berikut :

1. Perubahan Pendapatan Daerah Baik yang Bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah

2. Pemanfaatan sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun anggaran 2024 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2024
3. Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah atas Kebijakan Pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya telah dilaksanakan dengan Mekanisme perubahan terhadap peraturan Walikota Blitar tentang Penjabaran APBD TA 2025 Yaitu dengan diundangkan nya peraturan walikota Blitar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas peraturan walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
4. Perubahan Belanja Daerah Terkait Prioritas Pembangunan, Penyesuaian Pemetaan Nomenklatur Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan, Penyesuaian atas alokasi Pendapatan Transfer, penyesuaian Anggaran atas Evaluasi Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang Prioritas dan efisiensi Anggaran Serta Hal – hal yang Terkait Penyesuaian Alokasi Belanja Lainnya Guna Mendukung Pencapaian Kinerja Tahun 2025.

Maka dengan adanya Efisiensi Anggaran diharapkan Pemerintah Kota Blitar mampu untuk mengambil langkah – langkah startegis pada hal – hal yang menjadi prioritas diantaranya :

- a. Bagaimana Menangani dan Mengurangi angka Pengangguran dan Kemiskinan
- b. Bagaimana Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan SDM yang Berdaya saing
- c. Bagaimana Peningkatan Kualitas Insfrastruktur dengan Memperhatikan kelestarian Lingkungan Hidup dan kebersihan Lingkungan
- d. Kemudian Peningkatan Pelayanan Pemerintahan yang Berbasis Digital dan Investasi
- e. Selanjutnya Pemantapan Kota Blitar Yang menjadi Rujukan atau Tujuan Wisata Sejahtera yang berwawasan Kebangsaan dan Kebudayaan.

Adapun Catatan dan Rekomendasi Pada kesempatan ini diantaranya :

1. Pada Kesempatan Yang Baik ini, kami sampaikan diharapkan Pemerintah Mampu Meningkatkan Pendapatan asli daerah dari sumber – sumber yang berpotensi menambah PAD, Kemudian Melakukan Monitoring guna memaksimalkan Hal Tersebut.
2. Dalam Rangka Memperbaiki Kualitas Pelayanan Rumah Sakit diharapkan Pemerintah Kota Blitar Mengambil Langkah Cepat, Tepat dan Efektif Menggigit hal tersebut Menyangkut Kehidupan Masyarakat.
3. Berkaitan dengan Kondisi Perumda Bank Perkreditan Rakyat untuk Dapat Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan. Melakukan Analis pada aktivitas pemberian kredit pada nasabah dengan cermat. Dan Kami harapkan di adakan monitoring dan audit external secara periodic atau Pemeriksaan Konsistensi Laporan Keuangan serta Pemeriksaan Pengelolaan Resiko Kredit.
4. Dalam Rangka Pelaksanaan Program Makan Gizi Gratis di sekolah – sekolah , Harap dilakukan Pengawasan dan Evaluasi, Mengingat sudah ada beberapa Kali ditemui nya permasalahan yang ada dilapangan, Mulai jam Kedatangan yang kadang terlambat, Kesesuaian Menu Makan dan Kebersihanya.
5. Kembali kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Blitar Terkait keberadaan Kios – kios pasar yang masih terlihat Kosong, diharapkan segera terisi. Guna Meningkatkan aktivitas Perekonomian di Kota Blitar.
6. Dan Beberapa Program Pemerintah yang Belum tercapai , untuk dapat di laksanakan sesuai dengan yang telah menjadi Perencanaanya.

Hadirin Rapat Paripurna Yang Berbahagia,

Dengan Mengucapkan "***Bismillahirohmannirohim*** " Kami Fraksi PDI Perjuangan "***Menerima dan Menyetujui*** " Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2025.

Demikian Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan, Semoga yang Apa telah Kami sampaikan Pada Paripurna Hari ini dapat Menjadi Bahan Masukan dan Pertimbangan dalam Melaksanakan Pemerintahan Kota Blitar Kedepannya.

Mohon Maaf jika ada Kesalahan atau kekurangan kami dalam menyampaikan Pendapat Fraksi ini. atas waktu dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan Terimakasih. Salam sehat selalu untuk Kita Semua.

Merdeka....!!!

Wabbillahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih

Selanjutnya, kita ikuti penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi DPRD. Kesempatan selanjutnya kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, disilahkan.

JUDARSO, SH – Anggota DPRD Kota Blitar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahi Walkhamdulillah Wasyukurillah Lahaula Walakuuwata Illabilahil adzim, Allohuma sholli ala syayidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa iha Wa afiyati abdani wasyifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi washohbihi wasalim.

- | | | |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yang Terhormat | – | Pimpinan Rapat, Pimpinan DPRD dan para Anggota DPRD Kota Blitar. |
| Yang kami hormati | – | Walikota Blitar |
| Yang kami hormati | – | Pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta Komandan Yonif 511 dan Ketua pengadilan Negeri Blitar . |
| | – | Sekretaris Daerah Kota Blitar |
| | – | Sekretaris DPRD Kota Blitar , Para Asisten, Staf Ahli, Para Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Camat dan Lurah se- Kota Blitar, serta |
| | – | Pimpinan partai - partai politik, Ormas dan LSM se- Kota Blitar dan rekan-rekan wartawan serta hadirin para undangan yang berbahagia. |

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi-frkasi DPRD Kota Blitar terhadap **RAPERDA PERUBAHAN APBD TA 2025**

Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, dan kita berharap semoga termasuk di dalamnya. Amin.

Ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada Pimpinan Sidang yang sudah memberikan kesempatan kepada Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Blitar untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap **RAPERDA PERUBAHAN APBD TA 2025** pada rapat paripurna yang terhormat ini.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT

Dengan Mengucap *BISMILLAHIRORHMANIROCHIM* “**TASHARRUFUL IMAM ‘ALA AL RO’IYAH MANUTUN BIL MASLAHAH,** “

DALAM PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) menyatakan “**MENERIMA DAN MENYETUJUI “** **ditetapkannya RAPERDA PERUBAHAN APBD TA 2025** sebagai PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR.

Dengan Catatan Strategis dan Rekomendasi sbb :

Dalam Catatan Strategis Fraksi PKB DPRD Kota Blitar disampaikan beberapa hal sbb :

- (1) Berdasarkan RAPERDA APBD TA 2025 pendapatan daerah diproyeksi sebesar Rp.906.494.064.755,96 meningkat targetnya sebesar Rp3.717.850.255,96 dibanding Pendapatan sebelum perubahan.
- (2) Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.959.944.907.883,55,- Turun alokasinya sebesar Rp.(15.311.088.613,45),- dari belanja APBD sebelum perubahan.
- (3) Proyeksi pendapatan dan alokasi belanja pada RAPERDA APBD TA 2025 ini juga menggeser defisit anggaran tahun berjalan, jika APBD sebelum perubahan tahun 2025 diperkirakan defisit sebesar Rp(72.479.781.997,00) pada RAPERDA APBD TA 2025 defisit berkurang menjadi Rp.(53.450.843.127,59) deficit tersebut dapat ditutup seluruhnya dengan pembiayaan netto yang bersumber dari penerimaan pembiayaan dari silpa tahun 2024 audited BPK sebesar Rp. 53.450.843.127,59,- sehingga Silpa tahun berjalan nihil.
- (4) Proyeksi pendapatan daerah dalam RAPERDA APBD TA 2025, lebih PESIMIS dibanding realisasi tahun sebelumnya.
Dalam RAPERDA APBD TA 2025 pendapatan diproyeksi sebesar Rp.906.494.064.756 turun Rp.(33.390.972.580) jika dibandingkan dengan realisasi 2024 sebesar Rp.939.885.037.336,- perubahan pendapatan daerah tahun 2025 proyeksinya tumbuh negatif 3,6%.
- (5) Proyeksi PAD meningkat sebesar Rp. 51.980.006.894 tumbuh 30,7% dibanding realisasi tahun 2024 (Sebagian besar peningkatan tersebut diperoleh dari target Pajak baru Opsen PKB sebesar Rp. 30.000.000.000,- dan opsen BBNKB sebesar Rp.12.500.000.000,-). PAD tahun 2025 dalam Perubahan APBD TA 2025 ditarget sebesar Rp.221.546.110.
- (6) Alokasi belanja daerah dalam RAPERDA APBD TA 2025 menjadi sebesar Rp. 959.944.907.884,- atau turun sebesar Rp.(15.311.088.613,45) dari belanja APBD sebelum perubahan yang dialokasikan sebesar Rp. 975.255.996.497,- jika dibandingkan dengan realisasi APBD tahun 2024 juga turun sebesar Rp. (15.590.953.889,16) atau minus 1,6%. Dimana realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp.975.535.861.773,-
Alokasi belanja dalam RAPERDA APBD TA 2025 menurun jumlahnya minus 1,6% dibanding realisasi tahun 2024 artinya volume pembangunan untuk tahun 2025 lebih kecil dibanding tahun sebelumnya.
- (7) Menakar efektifitas pemanfaatan dukungan pendanaan untuk mencapai visi misi tahun 2025 berdasarkan sasaran rpjmd 2025-2029 ; visi: kota blitar yang maju, sehat dan sejahtera menuju kota masa depan,
Kepada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah agar mengoptimalkan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam kerangka mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi walikota sbb :

REKOMENDASI :

- 1) Pemerintah Daerah melalui TAPD diminta lakukan antisipasi terhadap potensi tidak tercapainya PAD Tahun 2025, didasarkan pada gambaran pronosis enam bulan berikutnya pada beberapa Perangkat Daerah yang cenderung negative atau pesimis untuk memenuhi target capaian PAD-nya, selain itu FRAKSI PKB meminta kepada Pemerintah Daerah melalui TAPD agar mencermati rendahnya serapan belanja daerah, berdasarkan capaian realisasi belanja sd 31 Agustus 2025 tidak beranjak dari angka 36,96% atau Realisasi sebesar Rp 361.022.556.985,70 dari pagu anggaran belanja Rp 976.894.486.497,00
- 2) Pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja daerah yang lebih berkualitas sehingga serapan anggaran tahun 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya dan silpa tahun berjalan tetap dapat ditekan pada batas normal $5\% \pm 1$ dari realisasi dana tersedia, sebagaimana realisasi APBD tahun 2024
- 3) SURPLUS ANGGARAN s/d 30 JULI 2025

Posisi realisasi APBD menunjukkan kondisi surplus sebesar Rp 94.916.865.062,23 pada akhir Semester I & Semester II APBD TA 2025. Surplus ini diperoleh dari selisih antara pendapatan yang sudah diterima dan belanja yang telah dikeluarkan.

Surplus ini kemudian ditopang oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 53.473.259.765,53 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp 53.450.843.127,59

Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan pada Semester I tahun 2025 sebesar Rp 148.390.124.827,76, seolah menjadi **IDLE CASH** / DANA NGANGGUR tersebut untuk segera di pergunakan sebaik -baiknya

- 4) Pemerintah Daerah agar meningkatkan capaian kinerja pengadaan barang dan jasa Pemerintah menunjukan performa yang kurang memadai/ rendah , diantaranya :
 - Pengadaan Barang pada perencanaan RUP terdapat 3.076 paket sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025 masih terserap / realisasi sejumlah 986 tersisa 2.090 atau 67%
 - Pekerjaan Konstruksi Berdasarkan perencanaan RUP terdapat 255 Sampai dengan tanggal 8 Agustus telah realisasi sejumlah 69 paket , tersisa 186 atau 72,94% sisanya
 - Jasa Lainnya Berdasarkan perencanaan pada RUP terdapat 1.429 Paket telah realisasi sejumlah 469 paket tersisa 960 paket atau 67%
- 5) Fraksi PKB menyoroti kinerja besar pasak dari pada tiang pada BUMD / PERUMDA atas bagian laba Perumda BPR Kota Blitar sebesar Rp.251.805.070,00 disisi lain pendanaan dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan BUMD, dalam RAPERDA PERUBAHAN APBD TA 2025 sebesar Rp 283.295.974,00
- 6) Pemerintah Daerah agar segera lakukan evaluasi terhadap dua Perumda Kota Blitar meliputi :
 1. Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) Perumda Tirta Patria , Laporan keuangan telah disusun dengan anggapan bahwa perusahaan akan melanjutkan usahanya secara berkelanjutan (*Going Concern*) sampai dengan Tahun buku 2022 perusahaan mengalami kerugian yang berulang kali dari usahanya, jumlah kerugian akumulatif sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp. 34.205.758.948.03 atau mencapai 71,99% dari jumlah modal yang telah ditempatkan sebesar Rp. 47.511.870.661,08,
 2. Pada Tahun 2024 mengalami penurunan Rp 3.316.521.357,53 berarti akumulasi kerugian s/d 2024 = Tahun 2022 ; 34.205.758.948.03 + Tahun 2023 ; (?) + Tahun 2024 ; Rp 3.316.521.357,5, artinya kerugian sudah mendekati modal yang telah ditempatkan sebesar Rp. 47.511.870.661,08,
 3. Pembebanan biaya *adjudgement* kerugian akibat fraud sebesar Rp. 1,038.013.000,00 sepenuhnya di tanggung oleh Perumda BPR Kota Blitar , Kasus fraud yang terjadi pada sekitar September 2018 hingga April 2019 hasil Pemeriksaan Khusus yang dilakukan mengakibatkan kerugian sebesar Rp 1.038.013.146
- 7) Pemerintah Daerah agar mencari solusi permasalahan pembangunan yang dirumuskan secara holistik-tematik dikelompokkan menjadi beberapa masalah pokok sebagai berikut:
 - Rata – rata lama sekolah penduduk Kota Blitar yang masih 10,82 atau setingkat kelas 2 SMA, belum mencapai target yang ditetapkan yaitu rata rata lama sekolah 12 tahun atau lulus SMA
 - Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di angka 9,868 (ribu jiwa) atau 6,75 % dari seluruh jumlah penduduk Kota Blitar
 - Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar yang masih tinggi yaitu di angka 5,11%

- Tingginya angka ketimpangan pendapatan Kota Blitar yaitu 0,353.
- Rendahnya tingkat pemanfaatan digital dalam sektor pemasaran produk Kota Blitar.
- Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah, sehingga ketergantungan finansial atau anggaran pembangunan daerah masih pada level 80% kepada pemerintah pusat.

PENUTUP

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa ini disertai CATATAN STRATEGIS DAN REKOMENDASI, dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam keputusan DPRD Kota Blitar dalam menetapkan persetujuan bersama antara DPRD Kota Blitar dengan Walikota Blitar

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih

Selanjutnya, kita ikuti penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi DPRD. Kesempatan selanjutnya kepada Fraksi Partai Golongan Karya, disilahkan.

PURWANTO, S.Sos – Anggota DPRD Kota Blitar dari Fraksi Partai Golongan Karya
Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang Saya hormati Saudara Ketua, Para Wakil ketua dan Anggota DPRD Kota Blitar.

Yang Saya hormati Saudara Walikota dan Wakil Walikota Blitar.

Yang Saya hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajarannya.

Yang Saya hormati Para Pejabat TNI, Sipil, Polri, dan Hadirin Sekalian.

Yang Saya hormati Saudara Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kota Blitar.

Serta Saya hormati Rekan – Rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta seluruh masyarakat Kota Blitar yang Kami banggakan.

Sebagai awal penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Golongan Karya DPRD Kota Blitar kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Swt, karena Dialah yang memberikan karunia kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir berkumpul ditempat ini pada acara Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Atas Raperda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2025. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, semoga kita sebagai pengikutnya dapat mengetahui mana jalan yang sesat dan mana jalan yang diridloi Allah SWT. Amin.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Ijinkan kami dari Fraksi Golongan Karya menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh Walikota Blitar pada Sidang Paripurna pada tanggal 12 September 2025, bertempat di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan karena terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan Umum Anggaran (APBN) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Selain itu terjadinya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar sub kegiatan dan antar jenis kegiatan serta pemanfaatan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan dengan tahun anggaran berjalan.

Setelah mempelajari dan mencermati, Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar, Fraksi Golongan Karya mengapresiasi atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025, maka iijinkanlah Kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi dengan beberapa Rekomendasi sebagai berikut :

1. Terkait perekrutan tenaga Outsourcing, perlu evaluasi kembali cara perekrutan baik secara langsung diserahkan ke OPD masing-masing atau melalui PT , sehingga memperoleh hasil yang terbaik bagi Kota Blitar.
2. Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2025 harus memprioritaskan pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan serta infrastruktur sehingga membawa manfaat nyata bagi pembangunan Kota Blitar lebih baik, maju serta dapat mewujudkan masyarakat sejahtera , adil dan makmur.
3. Terkait SILPA tahun anggaran sebelumnya, harus dimanfaatkan diarahkan pada program bermanfaat langsung bagi masyarakat dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien .
4. Tingginya tingkat kemiskinan di Kota Blitar perlu menjadi perhatian pemerintah agar perubahan anggaran difokuskan pada program -program yang menjadi prioritas pembangunan daerah antara lain peningkatan ekonomi masyarakat dan penanganan pengangguran dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
5. Terkait dengan perubahan target pendapatan daerah terutama Pajak daerah dan redistribusi daerah, kinerja OPD terkait harus ditingkatkan agar dapat tercapai target yang ditetapkan untuk Redistribusi daerah sebesar Rp. 121 sekian Milyar dari sebelumnya Rp. 120 sekian Milyar atau dengan kenaikan 0,17%.
6. Pentingnya keselarasan program prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat antara lain program dukungan makanan bergizi gratis untuk kepentingan masyarakat Kota Blitar.
7. Prinsip efisien , efektivitas serta transparansi dan akuntabilitas penggunaan Anggaran harus dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.
8. Meskipun anggaran terbatas, petingnya memaksimalkan penggunaan anggaran dan memprioritaskan sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penurunan tingkat kemiskinan serta lapangan kerja untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
9. Perlunya penggunaan anggaran pada kebutuhan mendesak difokuskan untuk permasalahan pelayanan dasar guna terwujudnya kesejahteraan secara luas.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Berkenaan dengan Pendapat Akhir Fraksi Golongan Karya atas Raperda Kota Blitar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, **“Menyepakati dan menyetujui Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”** , agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaannya sehingga mampu menjadi wadah kebutuhan masyarakat , guna mendukung percepatan pembangunan Kota Blitar.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Golongan Karya Terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 Kota Blitar.

Akhir kata, terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua, dalam mengemban tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

Billahitaufiq WalHidayah,

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarahkatuh.

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih

Selanjutnya, kita ikuti penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi DPRD.

Kesempatan selanjutnya kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, disilahkan.

GUNTUR PAMUNGKAS, SM – Anggota DPRD Kota Blitar dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Bismillahirrohmanirohim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah wakafaa, wassholatu wassalaamu 'alaa rosulihil musthofaa, wa'alaa aalihi wasohbihi wamanih tadaa, amma ba'du

Yang terhormat : Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kota Blitar

Yang kami hormati : Saudara Walikota Blitar

Yang kami hormati : Saudara Sekretaris Daerah Kota Blitar

Yang kami hormati : Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Beserta Komandan Yonif 511 Dan Ketua Pengadilan Negeri Blitar (atau yang mewakili)

Yang kami hormati : Sekretaris DPRD, Para Asisten, Staf Ahli, Tenaga Ahli Fraksi, Kepala Badan / Dinas /Bagian / Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Para Pejabat Sipil, TNI dan POLRI, serta rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik, para tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala limpahan Rahmat, Nikmat, dan taufik-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna pagi hari ini dalam keadaan sehat wal afiat, lahir maupun batin, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan dengan mengharap Ridho dan pertolongan-Nya pula, semoga setiap amal perbuatan kita dalam kebaikan dan saling tolong-menolong senantiasa mendapatkan ma'unah dan petunjuk dari Allah SWT.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, teladan mulia yang senantiasa adil dan bijaksana dalam setiap tindakan dan keputusan. Semoga kita mampu mengikuti sunnah-sunnah beliau, serta kelak memperoleh syafaatnya. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga menyampaikan harapan semoga momentum pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini semakin mempererat kedekatan kita dengan rakyat, serta menjadikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar **bermanfaat, berguna, dan dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Blitar.**

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk dapat membacakan Pendapat Akhir Fraksi **terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025**, yang kita bahas pada pagi hari ini

**Rapat paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kota Blitar
Tahun Anggaran 2025. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat :**

1. Kemandirian ekonomi dan pendataan ulang wajib pajak

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memahami bahwa kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kebutuhan strategis Kota Blitar. Hal ini semakin penting mengingat transfer dana dari pemerintah pusat cenderung stagnan, sementara kebutuhan belanja daerah terus meningkat.

Salah satu langkah penting untuk memperkuat PAD adalah dengan melakukan **pendataan ulang wajib pajak**, baik dari sektor usaha, kepemilikan aset, maupun aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, Fraksi PPP menekankan agar pemerintah tidak mengabaikan kondisi sosial ekonomi warga Kota Blitar, yang mayoritas berasal dari kalangan menengah ke bawah, dengan ketergantungan

tinggi pada sektor informal seperti perdagangan kecil, UMKM, jasa, serta pertanian perkotaan.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pasca pandemi masih cukup tinggi. Sementara sektor industri besar yang mampu menyerap tenaga kerja masih terbatas. Di sisi lain, UMKM memang tumbuh pesat, tetapi masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama akses permodalan, pemasaran, dan daya saing produk.

Data ekonomi yang ada juga menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara potensi pajak yang seharusnya bisa dipungut dengan realisasi di lapangan. Hal ini disebabkan data wajib pajak yang belum mutakhir.

Oleh karena itu, sebelum melakukan pendataan ulang, Fraksi PPP berpesan agar pemerintah Kota Blitar **menjalankan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak**, antara lain dengan:

- Menerapkan sistem klarifikasi melalui verifikasi lapangan, sehingga tercipta rasa adil dan tidak menimbulkan gejolak sosial. Terutama agar pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah tidak diperlakukan sama dengan wajib pajak menengah ke atas.
- Memastikan adanya klasifikasi objek pajak berbasis kemampuan ekonomi, sebagaimana amanat pasal 23a UUD1945 tentang asas keadilan dalam pemungutan pajak. Sebagai contoh, pajak reklame usaha mikro tentu tidak bisa disamakan dengan reklame usaha besar atau jaringan nasional.

2. Penciptaan lapangan pekerjaan baru hingga tingkat RT/RW

Fraksi PPP menilai penciptaan lapangan pekerjaan baru merupakan kebutuhan mendesak di Kota Blitar. Angka pengangguran terbuka masih tinggi, sementara ketersediaan industri besar sangat terbatas. Masyarakat Kota Blitar saat ini sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor informal dan UMKM, sehingga program penyediaan pekerjaan harus benar-benar menyentuh hingga tingkat paling bawah, yakni RT/RW.

Kondisi yang dihadapi saat ini antara lain:

1. Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi, dipengaruhi keterbatasan lapangan kerja baru, minimnya industri besar, serta rendahnya daya serap tenaga kerja lulusan sekolah menengah maupun perguruan tinggi.
2. UMKM dan usaha keluarga menjadi tulang punggung ekonomi warga, namun masih terkendala permodalan, pemasaran, teknologi digital, dan kestabilan bahan baku.
3. Program bantuan sebelumnya seperti bantuan alat usaha, bantuan modal umkm, program padat karya, serta pelatihan keterampilan memang memberi dampak positif, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.

Fraksi PPP menegaskan, program penciptaan lapangan kerja tidak boleh sekadar menjadi dalih penyerapan anggaran tanpa arah keberlanjutan. Program harus berbasis pada **peningkatan kualitas SDM**, sehingga warga tidak hanya mendapat pekerjaan sementara, tetapi juga memiliki kapabilitas untuk mandiri.

Untuk memperkuat penciptaan lapangan kerja baru, pemerintah perlu:

1. **Meningkatkan kualitas program bantuan.**
 - Bantuan usaha mikro harus disertai pendampingan intensif hingga usaha berjalan stabil.
 - Bantuan modal perlu dibarengi manajemen usaha sederhana agar benar-benar berkembang.
2. **Memfokuskan program hingga tingkat RT/RW.**
 - Program padat karya berbasis lingkungan, seperti pengelolaan sampah, *urban farming*, dan wisata kampung tematik, bisa menciptakan pekerjaan langsung.
 - Dukungan koperasi mikro di tingkat RT/RW yang menghimpun usaha kecil warga agar lebih berdaya saing.
3. **Fasilitasi pemasaran dan digitalisasi.**

- Produk umkm harus masuk ke platform digital dengan dukungan pemerintah.
 - Pemerintah dapat menyediakan *market hub lokal* berupa galeri UMKM di setiap kelurahan, serta mendukung penjualan daring.
4. **Peningkatan kapasitas sdm.**
- Pelatihan keterampilan baru seperti *digital marketing*, desain produk, teknologi pangan, hingga jasa kreatif harus diperbanyak.
 - Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sekolah kejuruan perlu diperkuat agar lulusan bisa langsung masuk ke dunia usaha.

Jika program ini dijalankan dengan baik, maka dalam lima tahun ke depan dapat dicapai:

- ❖ Penurunan signifikan angka pengangguran terbuka.
- ❖ Kemandirian UMKM yang lebih kuat melalui dukungan modal, pemasaran, dan pendampingan berkelanjutan.
- ❖ Perekonomian lokal yang berdaya saing, tidak hanya bertumpu pada konsumsi, tetapi juga produksi kreatif.

Sebaliknya, jika program hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, maka hasilnya akan semu dan masalah pengangguran serta lemahnya UMKM akan terus berulang setiap tahun.

Mitigasi banjir dan perencanaan anggaran infrastruktur

Fraksi PPP mengingatkan kembali bahwa peristiwa banjir yang melanda beberapa wilayah Kota Blitar baru-baru ini merupakan peringatan serius atas lemahnya perencanaan tata ruang dan infrastruktur drainase.

Kami menekankan agar pemerintah Kota Blitar tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam penyusunan anggaran. Prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi sebagaimana diatur dalam UU no. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara harus diterapkan. Setiap kebijakan infrastruktur wajib berbasis kajian teknis yang matang, serta memastikan bahwa anggaran benar-benar menyelesaikan masalah di lapangan, bukan sekadar terserap.

Rekomendasi

berdasarkan uraian di atas, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Blitar memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mendorong pemerintah Kota Blitar untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui pendataan ulang wajib pajak yang adil, transparan, serta berbasis kemampuan masyarakat, guna mencegah gejolak sosial.
2. Menegaskan agar setiap program penciptaan lapangan kerja baru hingga tingkat RT/RW harus berkelanjutan, berbasis evaluasi program terdahulu, serta disertai pendampingan yang mengakomodasi potensi lokal masyarakat.
3. Mendesak pemerintah kota Blitar untuk serius menata kembali perencanaan infrastruktur drainase dan tata ruang sebagai langkah antisipasi banjir, sehingga APBD benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang berpihak pada rakyat.

Penutup

Sebelum kami akhiri, perkenankan kami menyampaikan pesan yang penting untuk kita renungkan bersama. Rasulullah SAW bersabda:

"Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian." (HR. Muslim)

Oleh karena itu, besar harapan kami semoga seluruh pemimpin dan pengampu kebijakan di Kota Blitar dapat menjadi pemimpin yang amanah, adil, dan benar-benar hadir menyelesaikan persoalan masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang kami sampaikan pada hari ini. Dan dengan mengucap **bismillahi tawakaltu 'alalloh** kami Fraksi PPP DPRD Kota Blitar menyatakan **menerima dan menyetujui** Raperda Tentang **Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025** untuk segera **ditetapkan**, dengan catatan, agar seluruh masukan dan rekomendasi yang kami sampaikan dapat di gunakan dalam menentukan kebijakan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Akhiru kalam

Wallahul muwafiq ilaa aqwamith thoriq... wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih

Selanjutnya, kita ikuti penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi DPRD.
Kesempatan selanjutnya kepada Fraksi Partai Amanat Nasional, disilahkan.

ADI RIAN TO – Anggota DPRD Kota Blitar dari Fraksi Partai Amanat Nasional

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Assalaamu'alaikum Warrohmatullaahi Wabarokaatuh

Yang Terhormat Pimpinan DPRD Kota Blitar

Yang Kami Hormati dan Kami Banggakan Walikota dan Wakil Walikota Blitar

Yang Kami Hormati Rekan-rekan Seluruh Anggota DPRD Kota Blitar

Yang Kami Hormati Forkompimda Kota Blitar

Yang Kami Hormati Seluruh Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Yang Kami Hormati Sekretaris DPRD Kota Blitar beserta seluruh Staff

Yang Kami Hormati Para Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kota Blitar Serta rekan-rekan wartawan yang berbahagia.

Sidang Dewan Yang Terhormat

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Blitar memberikan apresiasi kepada Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, bersama Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba dan jajaran Pemerintah Kota Blitar yang telah menyusun Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 dengan mengacu pada dinamika kebijakan nasional, provinsi, maupun kebutuhan daerah. Upaya ini menunjukkan komitmen untuk menjalankan amanat peraturan perundangan, antara lain Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian TKD, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025, serta PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Fraksi PAN menilai bahwa arah kebijakan fiskal Kota Blitar dalam P-APBD 2025 telah ditempatkan pada jalur yang benar. Namun demikian, terdapat beberapa catatan rekomendasi dari fraksi PAN yang perlu menjadi perhatian:

Pertama, terkait alokasi mandatory spending, Fraksi PAN mengapresiasi bahwa sektor pendidikan telah dianggarkan sebesar 23,94% dari total belanja daerah, melebihi ketentuan minimal 20% sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Akan tetapi, Fraksi PAN menekankan agar alokasi ini tidak berhenti pada pemenuhan angka, melainkan diarahkan pada kualitas nyata, seperti peningkatan kapasitas guru, kesejahteraan guru dan pengajar, rehabilitasi sarana sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan pemerataan akses pendidikan dan beasiswa.

Sidang Dewan Yang Terhormat

Kedua, dalam hal Belanja pegawai tercatat mencapai Rp345 miliar atau 35,97% dari total belanja daerah, melebihi ketentuan Pasal 146 UU Nomor 1 Tahun 2022 yang membatasi maksimal 30%. Untuk itu Fraksi PAN meminta agar Pemerintah Kota melakukan langkah korektif melalui rasionalisasi belanja operasional, serta percepatan digitalisasi pelayanan publik. Disisi lain Fraksi PAN juga menegaskan bahwa tingginya alokasi belanja pegawai seharusnya sejalan dengan peningkatan kesejahteraan bagi pegawai yang berada di garda terdepan pelayanan publik, termasuk tenaga kesehatan, guru, dan pegawai lapangan. Alokasi yang melebihi batas mandatory spending tidak boleh hanya membebani fiskal, tetapi harus dirasakan manfaatnya langsung oleh para pegawai dan masyarakat yang mereka layani.

Ketiga, Fraksi PAN berharap perlu adanya manfaat substantif dari Perubahan APBD, sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung hasil kebijakan perubahan anggaran. Oleh karena itu, Pemerintah Kota diharapkan dapat menjelaskan secara terbuka arah pergeseran maupun penyesuaian program agar lebih tepat sasaran.

Sidang Dewan Yang Terhormat

Dengan mengucapkan Bismillaahirrahmaanirrahiim, **Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Blitar MENERIMA DAN MENYETUJUI** Raperda tentang P-APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan catatan dan masukan yang telah kami sampaikan sebelumnya agar dapat menjadi bagian dari penyempurnaan dokumen ini, baik secara substansi, teknis, maupun implementasinya.

Kami percaya, dengan semangat gotong royong, pengabdian yang tulus, dan komunikasi yang baik seluruh unsur pemerintah, Kota Blitar akan mampu melangkah maju menjadi kota masa depan yang SAE dan membanggakan. Demikian Pendapat Akhir ini kami sampaikan, semoga Allah SWT meridhoi setiap ikhtiar yang kita jalankan demi kemaslahatan masyarakat Kota Blitar.

Fastabiqul Khoirot

Wassalamu'alaikum Warrohmatullaahi Wabarokaatuh.

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian tadi telah kita simak laporan Badan Anggaran terkait hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025, serta Pendapat Akhir dari Fraksi – Fraksi DPRD.

Selanjutnya untuk memenuhi hak seluruh anggota DPRD, maka saya tawarkan pada Forum Rapat Paripurna hari ini :

- Apakah Raperda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui?

----- (Persetujuan secara aklamasi dari Anggota DPRD Kota Blitar) -----

-----Ketukan Palu 1x-----

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima Kasih,

Selanjutnya, kita simak bersama penyampaian Pendapat Akhir Walikota Blitar. Kepada Saudara Walikota Blitar, disilahkan.

Walikota Kota Blitar - H. SYAUQUL MUUHIBBIN, S.H.I

Assalaamu'alaikum wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat, sdr. Ketua, para wakil ketua dan Segenap Anggota DPRD Kota Blitar,
Yang saya hormati, sdri. Wakil Wali Kota Blitar,
Yang saya hormati, Rekan - Rekan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Beserta Komandan Yonif 511 dan Ketua Pengadilan Negeri Blitar (atau yang mewakili),
Yang saya hormati, sdr. Sekretaris Daerah Kota Blitar,
Yang saya hormati, Para Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Badan,
Kepala Dinas, Kepala Bagian, Dan Camat Se-Kota Blitar,
Yang saya hormati, rekan – rekan wartawan,
Serta segenap hadirin dan undangan yang berbahagia,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama senantiasa meningkatkan rasa syukur ke Hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan Nikmat, Rahmat dan Karunianya pada pagi hari ini, kita dapat menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, dalam Acara Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar.

Hadirin rapat paripurna dewan yang terhormat,

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua beserta unsur Pimpinan DPRD, serta seluruh anggota DPRD Kota Blitar atas kerjasama dan sinergi yang terjalin selama masa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini. Seluruh tahapan pembahasan telah dilaksanakan dengan lancar, baik melalui Badan Anggaran, Komisi-Komisi Dan Bapemperda sehingga rancangan peraturan daerah yang telah kami ajukan, hari ini akan mendapatkan persetujuan bersama dalam forum sidang paripurna yang terhormat ini. Rekomendasi berupa koreksi, saran, masukan, dan usulan selama pembahasan rancangan perda akan menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti, antara lain terkait dengan:

Pertama, Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2025 merupakan dokumen yang akan menjadi panduan pelaksanaan program kegiatan sekaligus menjadi wujud komitmen bersama antara pemerintah dan DPRD agar menghasilkan perencanaan anggaran yang baik. Dengan selalu mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk mengelola belanja daerah secara efektif, efisien berdasarkan skala prioritas yang terukur dengan melakukan pemenuhan wajib pelayanan dasar, pemenuhan *mandatory spending* serta program pelaksanaan sinkronisasi prioritas pemerintah pusat antara lain: pengentasan kemiskinan, penurunan angka prevalensi stunting, pengendalian inflasi serta pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Ketiga, Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk selalu menjaga sinkronisasi dan harmonisasi dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan untuk memastikan konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses sinkronisasi melibatkan:

- a) Penyusunan RKPD yang berpedoman pada RPJMD dan Renstra SKPD
- b) Penyusunan KUA dan PPAS yang berpedoman pada RKPD
- c) Penyusunan RKA-SKPD yang berpedoman pada KUA dan PPAS
- d) Pembahasan R-APBD yang berpedoman pada KUA, PPAS, dan RKA-SKPD

Keempat, Pemerintah Kota Blitar akan terus berupaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta optimalisasi pengelolaan barang milik daerah sebagai alternatif sumber pendapatan kreatif. Peningkatan akses dan cakupan layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah terus ditingkatkan dengan sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah

Daerah (ETPD), sedangkan pemanfaatan aset bisa dilaksanakan melalui sistem sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dan kerja sama infrastruktur. Pemerintah akan melakukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.

Kelima, dalam rangka pelaksanaan APBD tahun 2025 di sisa tribulan keempat ini, pemerintah menerapkan strategi percepatan realisasi perubahan apbd dengan cara:

- a) Melakukan pengawasan dan monitoring secara ketat terhadap pelaksanaan anggaran untuk memastikan bahwa realisasi APBD berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- b) Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses realisasi perubahan APBD, seperti proses pengadaan barang jasa, permasalahan administrasi, teknis, atau kebijakan, dan melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengatasinya.
- c) Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar perangkat daerah terkait, untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD berjalan efektif dan efisien.
- d) Melakukan efisiensi belanja dengan memprioritaskan belanja yang produktif dan memotong belanja yang tidak perlu, sehingga dapat meningkatkan kualitas belanja pemerintah.
- e) Menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan perubahan APBD, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran, serta
- f) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan APBD.

Keenam, terhadap kinerja pengelolaan BUMD, pemerintah akan segera mengambil langkah konkrit memperbaiki kinerja BUMD untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaannya. Beberapa langkah yang akan dilakukan yaitu:

- a) Melakukan evaluasi kinerja BUMD secara berkala untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi area perbaikan.
- b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bumd untuk memastikan bahwa BUMD dikelola secara profesional dan transparan.
- c) Mendorong penerapan tata kelola yang baik dalam BUMD, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko.
- d) Melakukan pengukuran kinerja bumd berdasarkan indikator kinerja utama, seperti keuangan, operasional, dan administrasi.
- e) Pemerintah daerah dan direksi BUMD akan menandatangani perjanjian kinerja dan pakta integritas untuk meningkatkan kinerja dan memaksimalkan potensi BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketujuh, sebagai tindaklanjut atas persetujuan bersama Rancangan Perda Perubahan APBD tahun 2025 ini, selanjutnya rancangan perda ini akan segera disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi. Keputusan gubernur disampaikan kepada walikota paling lambat 15 hari terhitung sejak rancangan perda Perubahan APBD diterima. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan oleh Walikota bersama DPRD melalui TAPD dan Badan Anggaran. Kepala daerah menetapkan Perda Perubahan APBD berdasarkan hasil penyempurnaan setelah mendapatkan nomer register dari gubernur. Selama masa evaluasi tersebut, akan dioptimalkan pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dan tidak mengalami perubahan agar terjadi akselerasi atas realisasi program kegiatan tersebut.

Hadirin rapat paripurna dewan yang terhormat,

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Semoga semua upaya kita untuk mewujudkan Kota Blitar yang baru, Kota Blitar maju menuju kota masa depan

senantiasa mendapatkan petunjuk, bimbingan dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala.

Sekian terima kasih.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thariiq

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih kepada Saudara Walikota Blitar.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Guna memenuhi ketentuan yang berlaku, selanjutnya akan dilaksanakan penandatanganan persetujuan bersama atas Raperda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025. Demi kelancaran acara, diminta bantuan pembawa acara untuk memandunya. Disilahkan..

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

Hadirin Rapat Paripurna Yang Kami Hormati, berikut akan dilaksanakan penandatanganan Persetujuan Bersama Raperda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025. Kepada Pimpinan DPRD Kota Blitar, Wali Kota Blitar, Wakil Wali Kota Blitar dan Sekretaris Daerah Kota Blitar berkenan menempati tempat yang telah ditentukan

Hadirin dimohon berdiri

Penandatanganan diawali oleh Ketua DPRD Kota Blitar, Bapak dokter Syahrul Alim disilakan

---- Bapak dr, Syahrul Alim menandatangani Persetujuan Bersama Atas Raperda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025-----

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

selanjutnya Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Bapak Adi Santoso Sarjana Pertanian disilakan

---- Bapak Adi Santoso, SP menandatangani Persetujuan Bersama Atas Raperda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025-----

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

selanjutnya Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Bapak Muhamad Hardita Magdi, Sarjana Hukum disilakan

---- Bapak Muhamad Hardita Magdi, SH menandatangani Persetujuan Bersama Atas Raperda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025-----

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

Selanjutnya berkenan Wali Kota Blitar

Bapak haji Syauqul Muhibbin Sarjana Hukum Islam disilakan.

---- Walikota Blitar menandatangani Persetujuan Bersama Atas Raperda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025-----

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

Dilanjutkan Penyerahan Raperda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025. Mohon izin foto bersama kami pandu. Satu.....dua.....tiga.....

Penandatanganan dan penyerahan selesai terima kasih. Silakan kembali ke tempat

Hadirin disilakan duduk kembali

Rapat paripurna akan dipimpin kembali oleh Ketua DPRD Kota Blitar yang terhormat bapak dokter Syahrul Alim, disilahkan

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih kepada Pembawa Acara.

Demikian tadi telah kita ikuti bersama penandatanganan persetujuan bersama atas Raperda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan DPRD Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar, Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota tersebut akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Untuk itu kepada Sdr. Walikota Blitar diharap segera menyampaikan Raperda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, acara pada hari ini telah selesai dengan lancar. Selanjutnya sebagai rasa syukur kehadirat Alloh Subhanahuwata'ala atas selesainya pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 serta agar apa yang telah disepakati bersama antara Walikota dan DPRD Kota Blitar dapat memberi manfaat yang sebesar – besarnya untuk masyarakat Kota Blitar, dimohon bantuan petugas dari kementerian agama untuk memandu pembacaan do'a disilahkan.

Pejabat dari Kementerian Agama Kota Blitar – Bapak MUH. GHOZI JARWANI, SAg

Audzubillahiminasyaitonirojim

Bismillahirrohmanirohim

Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Walhamdulillah rabbil alamin Hamdas syakirin, hamdan na'imin hamdan yuwaff niamahu wa yukafiu mazidah.

Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghii lijalali wajhikal karimi wa 'adhimiwa adibi sulthanik Allahuma

Ya Allah... Ya Tuhan Kami

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat mu Ya Allah SWT atas segala kenikmatan yang telah engkau anugerahkan kepada kami sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar, telah berjalan dengan hikmat, tertib dan lancar.berkat naungan dan ridha-Mu.

Ya Allah.... Tuhan Yang Maha Pengasih

Jadikanlah Rapat Paripurna ini sebagai acara yang engkau ridhai, sebagai pintu turunnya rahmat dan karunia-Mu yang dapat membawa manfaat dan barokah bagi masyarakat khususnya Kota Blitar.

Ya Allah...Ya Karim.....

Dengan adanya penetapan persetujuan bersama ini, dapat memperlancar pembangunan di Kota Blitar . Hal ini tidak lepas berkat kerja sama yang baik antara DPRD Kota Blitar, Pemerintah Daerah Kota Blitar, dan Forkopimda Kota Blitar yang didukung penuh oleh masyarakat demi mewujudkan masyarakat yang maju, sehat dan sejahtera menuju kota masa depan kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur

Ya Allah... Tuhan Yang Maha Agung

Bimbinglah setiap langkah dan perjuangan kami dengan petunjuk, berilah kami kekuatan lahir dan batin. Bukakanlah kami pintu pintu keberkahan pintu kebaikan, pintu kenikmatan dan pintu keselamatan. Hindarkanlah kami dari segala rintangan dan cobaan hindarkanlah kami dari segala musibah dan bencana jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepada-Mu dan selalu mensyukuri atas segala nikmat nikmat-Mu

Ya Allah....YaTuhan Kami....

Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim watub alaina innaka antat tawwabur rahim

Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah waqina adzabannar

Wa shallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad salam wa alhamdulillahi rabbil alamin

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih kepada petugas doa.

Demikian acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar pada hari ini, saya nyatakan dengan resmi ditutup.

----Ketukan Palu 3x----

Sekian terima kasih

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

Bapak ibu yang kami hormati dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar pada hari ini. Mari kita bekerja bersama untuk Kota Blitar sejahtera. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Selamat Siang

Wa as-salaamu wa alaikum warahmatullahi wa barakaatuh

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Blitar telah menyampaikan Berita Acara tentang Perubahan Propemperda Tahun 2025 antara DPRD Kota Blitar dengan Pemerintah Kota Blitar.
2. Anggota DPRD Kota Blitar secara keseluruhan menyetujui Perubahan Propemperda Tahun 2025 antara DPRD Kota Blitar dengan Pemerintah Kota Blitar.
3. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Golongan Karya, Fraksi Partai Persatuan Indonesia dan Fraksi Partai Amanat Nasional dalam Pandangan Akhir Fraksi **menerima dan menyetujui atas Raperda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025.**
4. Dalam Pendapat Akhir Walikota terhadap Raperda tentang Raperda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025, rekomendasi berupa koreksi, saran, masukan, dan usulan selama pembahasan rancangan perda akan menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti oleh Walikota Blitar bersama jajarannya
5. Telah dilaksanakan penandatanganan Persetujuan Bersama Atas Raperda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 antara Pimpinan DPRD Kota Blitar dengan Walikota Blitar

(Rapat ditutup pukul 11.00 WIB)

Sekretaris
DPRD Kota Blitar



Dra. EKA ATIKAH

NIP. 19680612 198803 2 006

DOKUMENTASI KEGIATAN







**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 19, Blitar, Kode Pos.: 66112, Telp. (0342) 801602
<https://setwan@blitarkota.go.id> e-mail: setwan@blitarkota.go.id

19 September 2025

Nomor : 900.1.1/790/410.040.3/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar
Yth. Daftar OPD Terlampir

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara pada Rapat Paripurna
DPRD Kota Blitar yang akan diselenggarakan pada :

- H a r i : Senin
- Tanggal : 22 September 2025
- Jam : 08.00 WIB
- Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Blitar
Jl. A. Yani No. 19 Kota Blitar
- Acara Paripurna : 1. Pembukaan
2. Pembacaan Berita Acara Perubahan
Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kota Blitar Tahun 2025
3. Penyampaian Laporan Badan Anggaran
hasil Pembahasan Raperda Kota Blitar
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025
4. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi
terhadap pembahasan Raperda Kota Blitar
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025
5. Pendapat Akhir Walikota Blitar Pembahasan
Raperda Kota Blitar tentang Perubahan Blitar
Tahun Anggaran 2025
6. Penetapan Persetujuan Bersama atas
Raperda Kota Blitar tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- 7. Pembacaan Doa
- 8. Penutup

Demikian atas kehadiran Saudara kami sampaikan terima kasih

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Blitar,
Ketua



dr. SYAHRUL ALIM

Catatan :

- Pakaian
- Anggota : PSR
- Sipil : PSR
- TNI-Polri : PDU-IV

